



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG TARGET PENDAPATAN PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan Nr 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 10);

18. Peraturan ...

18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 20);
24. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 21);
25. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 23) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 06);

27. Peraturan ...

27. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 06);
28. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 31);
29. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 19);
30. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 22);
32. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 24);

34. Peraturan ...

34. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 30);
35. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 18);
36. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 15);
37. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Milik Pemerintah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12);
39. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
40. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 16);
41. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
42. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
43. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 40);
44. Peraturan ...

44. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
45. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 77);
46. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Penekanan Tugas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 46);
47. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 56 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 28);
48. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 16);
49. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 48);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 16) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 November 2018

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 52

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR 52 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 PASURUAN NOMOR 16 TAHUN 2018  
 TENTANG TARGET PENDAPATAN PAJAK  
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2018

TARGET PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	URAIAN	SKPD PEMUNGUT	TARGET TA 2018 SETELAH PERUBAHAN	TARGET TRIBULAN I		TARGET TRIBULAN II		TARGET TRIBULAN III		TARGET TRIBULAN IV	
				%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1	Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah		35.924.578.686,14		6.933.196.502,00		15.491.031.704,00		29.277.751.772,00		35.924.578.686,14
4.1.1	Hasil Pajak Daerah		31.711.141.664,14		4.932.422.500,00		11.448.503.500,00		23.195.500.066,00		27.820.670.466,14
4.04.02.01.00.00.4.1.1.01	Pajak Hotel	Badan Pendapatan Daerah	380.776.000,00	20	69.000.000,00	41	144.000.000,00	78	273.424.225,00	100	350.100.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.02	Pajak Restoran	Badan Pendapatan Daerah	1.402.500.000,00	19	178.065.000,00	41	392.000.000,00	99	950.000.000,00	100	954.960.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.03	Pajak Hiburan	Badan Pendapatan Daerah	91.200.000,00	10	8.728.000,00	26	21.818.000,00	99	84.000.000,00	100	85.000.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.04	Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah	760.000.000,00	14	108.605.000,00	36	271.472.000,00	62	472.755.588,00	100	760.000.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	Badan Pendapatan Daerah	14.400.000.000,00	25	3.000.000.000,00	50	6.000.000.000,00	86	10.284.122.320,00	100	12.000.000.000,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.07	Pajak Parkir	Badan Pendapatan Daerah	34.104.000,00	21	6.000.000,00	43	12.000.000,00	98	27.500.000,00	100	28.048.800,00
4.04.02.01.00.00.4.1.1.08	Pajak Air Tanah	Badan Pendapatan Daerah	95.042.400,00	22	21.000.000,00	46	43.500.000,00	74	70.115.308,00	100	95.042.400,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.04.02.01.00.00.4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	3.547.519.266,14	1	41.024.500,00	26	913.713.500,00	81	2881.256.184,00	100	3.547.519.266,14
4.04.02.01.00.00.4.1.1.12	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	Badan Pendapatan Daerah	11.000.000.000,00	15	1.500.000.000,00	37	3.650.000.000,00	65	8.148.326.441,00	100	10.000.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah		7.830.667.870,00		2.000.774.002,00		4.042.528.204,00		6.082.251.706,00		8.103.908.220,00
4.1.2.01	<i>Retribusi Jasa Umum</i>		4.896.538.820,00		1.288.845.679,00		2.617.862.558,00		3.956.922.237,00		5.275.901.820,00
1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	Dinas Kesehatan	436.965.500,00	25	109.241.375,00	50	218.482.750,00	75	327.724.125,00	100	436.965.500,00
2.05.01.01.00.4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	580.774.200,00	25	145.193.550,00	50	290.387.100,00	75	435.580.650,00	100	580.774.200,00
1.04.01.01.00.4.1.2.01.17	Retribusi Pelayanan Penguburan /Pemakaman	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29.000.000,00	25	6.812.499,00	50	13.624.998,00	75	20.437.497,00	100	27.250.000,00
2.09.01.01.00.4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	2.055.690.000,00	24	572.439.600,00	49	1.185.050.400,00	75	1.807.704.000,00	100	2.410.270.000,00
3.06.01.01.00.4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	71.640.000,00	25	18.810.000,00	50	37.620.000,00	75	56.430.000,00	100	75.240.000,00
3.06.01.01.00.4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	190.082.400,00	25	47.520.600,00	50	95.041.200,00	75	142.561.800,00	100	190.082.400,00
3.06.01.01.00.4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios dan Bedak	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.213.500.720,00	25	309.207.180,00	50	618.414.360,00	75	927.621.540,00	100	1.236.828.720,00
2.09.01.01.00.4.1.2.01.23	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) - Mobil Penumpang - Sedan	Dinas Perhubungan	314.382.500,00	25	77.276.250,00	50	154.552.500,00	75	231.828.750,00	100	309.105.000,00
1.05.03.01.00.4.1.2.01.34	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.503.500,00	25	1.125.875,00	75	2.251.750,00	75	3.377.625,00	100	4.503.500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha		2.365.088.550,00		571.855.698,00		1.140.145.396,00		1.705.111.594,00		2.258.965.900,00
2.05.01.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah & Bangunan (Taman Kota)	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	5.200.000,00	0	0	50	2.600.000,00	100	5.200.000,00	100	5.200.000,00
1.04.01.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah & Bangunan (Rusunawa)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	806.714.800,00	25	175.366.200,00	50	350.732.400,00	75	526.098.600,00	100	701.464.800,00
3.06.01.01.00.4.1.2.01.22	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan (Senkuko)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.640.000,00	0	0	100	10.640.000,00	100	10.640.000,00	100	10.640.000,00
2.13.01.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	62.312.500,00	58	36.362.500,00	66	41.262.500,00	86	53.362.500,00	100	62.312.500,00
1.20.03.01.00.4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan	Bagian Umum,	51.400.000,00	19	9.900.000,00	59	30.400.000,00	91	46.900.000,00	100	51.400.000,00
4.04.01.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah & Bangunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	1.124.590.000,00	25	281.145.498,00	50	562.290.996,00	75	843.436.494,00	100	1.124.590.000,00
2.09.01.01.00.4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	Dinas Perhubungan	21.600.000,00	25	5.400.000,00	50	10.800.000,00	75	16.200.000,00	100	21.600.000,00
1.03.01.01.00.4.1.2.02.02	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Laboratorium	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	26.610.000,00	0	0	15	3.991.500,00	45	11.974.500,00	100	26.610.000,00
1.20.03.01.00.4.1.2.02.04	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Kendaraan Bermotor	Bagian Umum	500.000,00	0	0	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.09.01.01.00.4.1.2.02.13	Retribusi Terminal-Tempat Parkir Untuk kendaraan Penumpang & Bis Umum	Dinas Perhubungan	2.670.000,00	25	666.000,00	50	1.332.000,00	75	1.998.000,00	100	2.670.000,00
2.09.01.01.00.4.1.2.02.15	Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya Dilingkungan Terminal	Dinas Perhubungan	20.248.600,00	25	5.061.000,00	50	10.122.000,00	75	15.183.000,00	100	20.248.600,00
2.09.01.01.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	63.650.000,00	25	15.912.000,00	50	31.824.000,00	75	47.736.000,00	100	63.650.000,00
2.13.01.01.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir GOR & Stadion	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	11.910.000,00	25	3.000.000,00	47	5.565.000,00	74	8.755.000,00	100	11.910.000,00
3.06.01.01.00.4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	94.800.000,00	25	23.700.000,00	50	47.400.000,00	75	71.100.000,00	100	94.800.000,00
3.03.01.01.00.4.1.2.02.19	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	61.370.000,00	25	15.342.500,00	50	30.685.000,00	75	46.027.500,00	100	61.370.000,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu		569.040.500,00		140.072.625,00		284.520.250,00		420.217.875,00		569.040.500,00
2.12.01.01.00.4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	560.290.500,00	25	140.072.625,00	50	280.145.250,00	75	420.217.875,00	100	560.290.500,00
2.12.01.01.00.4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	64.350.000,00	25	16.087.500,00	50	32.175.000,00	75	48.262.500,00	100	64.350.000,00
2.12.01.01.00.4.1.2.03.04	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.750.000,00	0	0	50	4.375.000,00	50	4.375.000,00	100	8.750.000,00

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO